
KINERJA

PERANAN KEBIJAKAN FISKAL DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

Atih Rohaeti Daviah

BUDAYA ORGANISASI: PENGERTIAN, PERKEMBANGAN DAN IMPLIKASI TERHADAP ORGANISASI

Aminuddin Irfani

RISIKO AUDIT DAN STRATEGI AUDIT AWAL

Hendra Gunawan

KONSUMEN HIJAU DAN PEMASARAN HIJAU

Ratih Tresnati

KEBIJAKAN MONETER: REFLEKSI TARGET INFLASI 2001

Muhammad Arsyad

PENGARUH PELAKU BISNIS DAN PRODUK TERHADAP KONSUMSI TEH DI KOTA BANDUNG

Dede R. Oktini

RETURN ON QUALITY : PENGUKURAN KUALITAS JASA SECARA KUANTITATIF MELALUI PENDEKATAN MANAJEMEN KEUANGAN

Tasya Aspiranti dan Sri Suwarsi

PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Muhardi



Diterbitkan oleh :
**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
(FE - UNISBA)**

Kinerja

Vol.4 No.1 Agustus 2002

Daftar Isi

Dari Redaksi
Daftar Isi

PERANAN KEBIJAKAN FISKAL DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA	1
<i>Atih Rohaeti Dariah</i>	
BUDAYA ORGANISASI: PENGERTIAN, PERKEMBANGAN DAN IMPLIKASI TERHADAP ORGANISASI	33
<i>Aminuddin Irfani</i>	
RISIKO AUDIT DAN STRATEGI AUDIT AWAL	49
<i>Hendra Gunawan</i>	
KONSUMEN HIJAU DAN PEMASARAN HIJAU	67
<i>Ratih Tresnati</i>	
KEBIJAKAN MONETER: REFLEKSI TARGET INFLASI 2001	83
<i>Muhammad Arsyad</i>	
PENGARUH PELAKU BISNIS DAN PRODUK TERHADAP KONSUMSI TEH DI KOTA BANDUNG	97
<i>Dede R. Oktini</i>	
RETURN ON QUALITY : PENGUKURAN KUALITAS JASA SECARA KUANTITATIF MELALUI PENDEKATAN MANAJEMEN KEUANGAN	111
<i>Tasya Aspiranti dan Sri Suwarsi</i>	
PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA	135
<i>Muhardi</i>	

I. PENDAHULUAN

Kinerja makroekonomi suatu negara akan menjadi tolak ukur sejauhmana tingkat kesejahteraan masyarakatnya dapat tercapai. Kinerja makroekonomi yang sehat tercermin dalam pencapaian prestasi yang terukur dalam variable-variabel makroekonomi, yang mencakup semua aspek ekonomi pada tingkat agregat, seperti perdagangan dalam dan luar negeri, investasi, konsumsi, tabungan, APBN, industri, keuangan, suku bunga, harga, kurs, kesempatan kerja, output dan distribusi pendapatan. Dalam kondisi sehat, stabilitas harga dan full-employment tercapai, keseimbangan neraca pembayaran terpelihara sehingga roda perekonomian dapat berjalan dengan baik dan pencapaian pendapatan nasional dapat menjamin tingkat kesejahteraan yang lebih memadai.

Stabilitas ekonomi yang mantap dan berkesinambungan tersebut dapat tercapai dan terpelihara tidak lepas dari peranan seperangkat kebijakan makroekonomi, yakni kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan investasi, kebijakan industrialisasi, dan kebijakan perdagangan luar negeri.

Berbagai kebijakan makroekonomi ini secara populer dapat digolongkan ke dalam sektor moneter dan sektor riil. Sektor moneter terkait erat dengan masalah keuangan, suku bunga, harga dan kurs, sedangkan sektor riil terkait erat dengan aspek investasi, produksi, konsumsi, kesempatan kerja dan distribusi pendapatan.

Eksistensi setiap kebijakan tersebut tidak dapat bekerja secara mandiri, semuanya bersifat saling mendukung dan harus terkoordinir. Namun untuk kepentingan analisis sangat dimungkinkan untuk melakukan '*partial analitic*' terhadap salah satu instrument kebijakan dalam frame makro. Dalam kesempatan ini konsentrasi pembahasan adalah sektor riil melalui kebijakan fiskalnya, dimana keberadaan dan performansi APBN sebagai wadah dari operasional kebijakan ini menjadi bagian yang inheren untuk dikaji.

I. PENGERTIAN DAN TUJUAN KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan fiskal secara umum dinyatakan sebagai kebijakan bagaimana mengelola permintaan (Branson, 1989: 75). Pada tataran operasional kebijakan

fiskal merupakan salah satu instrument kebijakan pemerintah dari sisi permintaan berkaitan dengan besaran anggaran (struktur pajak, belanja pemerintah, dan subsidi), yang dapat dipakai untuk mencapai target output, angka pengangguran, dan inflasi pada level tertentu. Dengan demikian tujuan dari kebijakan fiskal ini (yang tentunya bersama-sama dengan kebijakan moneter) adalah untuk memelihara output mendekati full-employment dan stabilitas tingkat harga (keseimbangan internal untuk kasus perekonomian tertutup). Munculnya excess demand akan menyebabkan inflasi, sedangkan ketidakcukupan dalam permintaan akan menimbulkan pengangguran secara temporer dan deflasi.

Berdasarkan arah perubahan nilai variabel target yang menjadi tujuan kebijakan, ada kebijakan yang bersifat ekspansi dan kontraksi. Kebijakan ekspansi yaitu kebijakan ekonomi makro yang mempunyai tujuan untuk memperbesar kegiatan ekonomi, yang umumnya diambil pada masa-masa perekonomian menghadapi banyak pengangguran dan kapasitas produksi nasional belum dalam pemanfaatan penuh. Sedangkan kebijakan kontraksi sebaliknya mempunyai tujuan untuk menurunkan kegiatan ekonomi, yang umumnya dilakukan pada masa-masa perekonomian dalam keadaan overemployment, yaitu keadaan dimana permintaan agregati melampaui besarnya kapasitas produksi nasional.

Variabel instrumen dalam kebijakan fiskal adalah G (government expenditure) dan T (pajak). Ekspansi fiskal berarti naiknya G atau turunnya T , sedangkan kontraksi fiskal adalah turunnya G atau naiknya T . Ada dua jenis pengeluaran pemerintah, yakni belanja negara atas barang dan jasa, dan transfer dana untuk pengeluaran publik lainnya. Semua uang yang dibelanjakan pemerintah tersebut akan memberikan efek stimulus terhadap perekonomian.

Kebijakan fiskal mengandung tiga tujuan utama (Sritua Arief, 1996: 287), yakni:

1. Resource allocation, untuk mempengaruhi alokasi sumber ekonomi dan mekanisme harga. Dalam konteks ini tujuan fiskal untuk menemukan keseimbangan yang tepat, baik dalam bentuk riil maupun dalam bentuk nilai nominal diantara alokasi sumber-sumber ekonomi untuk sektor publik dan

opportunity cost pengalihan sumber-sumber ekonomi dari penguasaan pihak swasta.

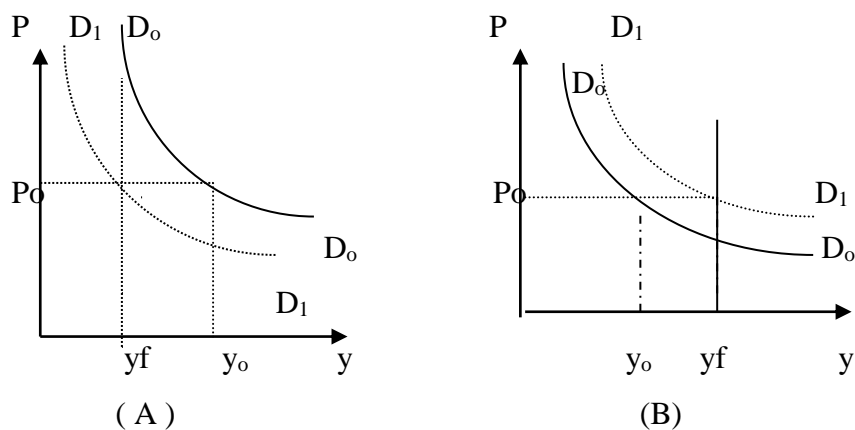
2. Untuk melakukan proses redistribusi kekayaan dan pendapatan antar golongan ekonomi dalam masyarakat. Dalam konteks ini untuk memperoleh keseimbangan antar individu dalam pendapatan bersih.

3. Untuk menentukan arah pertumbuhan dan kestabilan ekonomi nasional. Ini sering dikaitkan dalam perubahan-perubahan output agregat, pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan harga-harga umum. Tugas kebijakan fiskal adalah mendesign tindakan-tindakan yang akan melancarkan pemanfaatan penuh sumber-sumber nasional, baik sumber daya alam, SDM, maupun sumber keuangan.

III. DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP KESEIMBANGAN MAKRO EKONOMI DOMESTIK (INTERNAL BALANCE)

Seperti yang sudah diungkapkan pada bahasan sebelumnya bahwa kebijakan fiskal berkaitan dengan kebijakan pengelolaan sisi permintaan, maka analisis kurva agregate demand (AD) sebagai titik-titik keseimbangan dari output yang diminta pada berbagai tingkat harga dapat merepresentasikan kondisi real dan menggambarkan arah perubahan.

Kurva AD yakni D_0 - D_1 (grafik di bawah ini), menunjukkan ketika tingkat harga awal P_0 keseimbangan output yang diminta adalah y_0 .

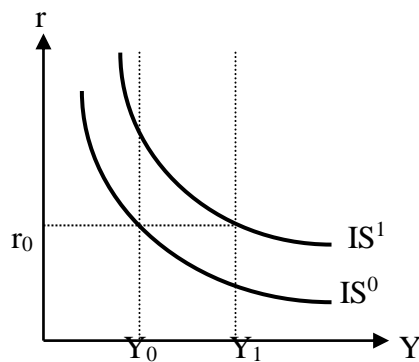
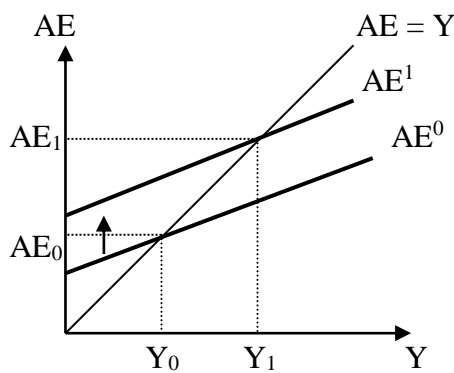


Pada gambar (A) menunjukkan jika perekonomian mencapai full-employment pada y_f , berarti terjadi excess demand yang akan mengakibatkan

inflasi. Dalam kasus seperti ini kebijakan fiskal akan dilakukan untuk menggeser kurva AD ke D_1D_1 , menghapus excess demand tanpa inflasi.

Sementara pada gambar (B) menunjukkan total permintaan yang lebih rendah dari output full-employmentnya, mengakibatkan terjadinya excess supply sehingga pengangguran akan meningkat dan harga turun. Dalam kasus seperti ini kebijakan fiskal akan dilakukan untuk menggeser kurva AD ke D_1D_1 , menghapus gap deflasioner dan mempertahankan keempatan kerja melalui ekspansi fiskal (G naik atau T turun).

Ekspansi fiskal melalui belanja pemerintah (G) merupakan bagian dari pengeluaran agregat atau *aggregate expenditure (AE)*, sehingga pengaruh langsungnya adalah terhadap keseimbangan pasar barang (bergesernya kurva IS).



Kurva AE menghubungkan antara tingkat pengeluaran riil diinginkan ($C + I + G - X - M$) dengan tingkat pendapatan riil (Y). Ekspansi fiskal akan menaikkan Agregate Expenditure sehingga menggeser kurva AE ke atas, pada tingkat bunga

tertentu akan menaikkan Y dan menggeser kurva IS ke kanan. Bagaimana proses selanjutnya yakni efek dari bergesernya kurva IS terhadap keseimbangan makroekonomi akan dibahas dalam dua pendekatan, yakni Keynes dan Klasik.

3.1 Kebijakan Fiskal Dalam Pendekatan Klasik

Dalam menganalisis dampak dari tindakan pemerintah melalui kebijakan fiskal terhadap perubahan keseimbangan makroekonomi, diassumsikan bahwa perekonomian menghadapi masalah pengangguran dimana output riil (y) yang tercapai lebih kecil dari tingkat full-employmentnya (y_f). Oleh karena itu kebijakan fiskal yang ditempuh bersifat ekspansi dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi dan produksi nasional, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan menurunkan pengangguran.

Dalam pandangan Klasik *demand for money* (M^D) tidak dipengaruhi oleh besarnya suku bunga (r), karena tujuan masyarakat memegang uang hanya untuk membiayai transaksi yakni membeli barang dan jasa. Uang tidak digunakan untuk tujuan spekulasi. Implikasi dari pemikiran ini kurva LM akan berbentuk tegak lurus. Maka ketika terjadi ekspansi fiskal yang ditunjukkan dengan bergesernya kurva IS (dari IS_0 ke IS_1), dampaknya hanya akan meningkatkan r dan tidak menimbulkan suatu perubahan terhadap Y . Kondisi ini menggambarkan terjadinya efek *crowding-out*, yakni suatu proses dalam perekonomian dimana kenaikan pengeluaran pemerintah diikuti oleh kemerosotan investasi swasta.

Jika ekspansi fiskal ini dibiayai dengan mencetak uang sehingga akan mendorong peningkatan penawaran uang, maka akan menggeser kurva AD (*aggregate demand*). Dalam pemikiran Klasik AD ditentukan oleh nilai MV dalam Teori Kuantitas $MV = PT$, dimana:

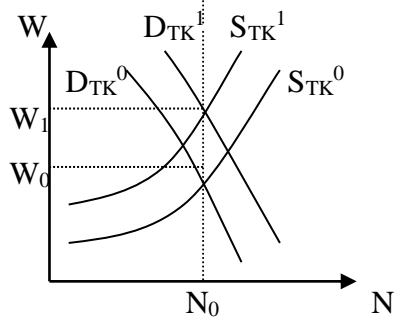
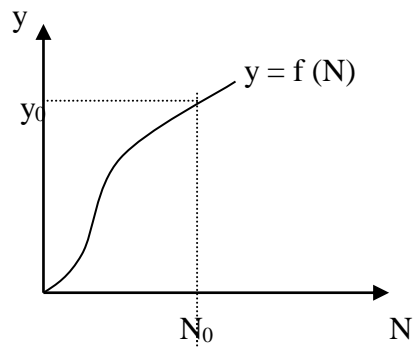
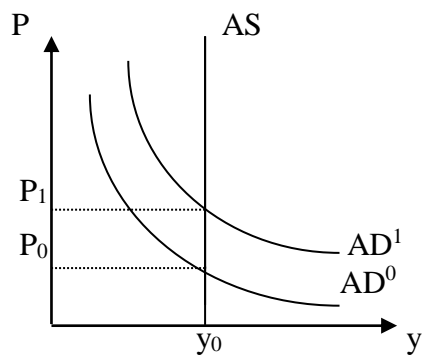
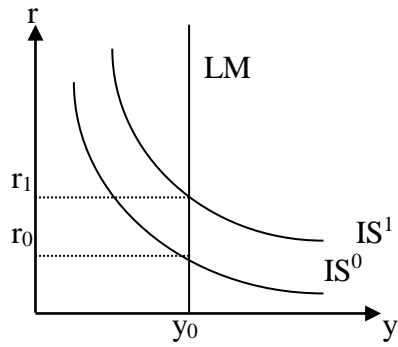
M = jumlah uang beredar (M^S)

V = laju peredaran uang

P = tingkat harga

T = jumlah barang dan jasa yang diproduksi

Dengan demikian jika M^S meningkat kurva AD akan bergeser ke kanan dari AD_0 ke AD_1 .



Teori Kuantitas telah menunjukkan bahwa kenaikan M^S akan menaikkan harga. Kenaikan harga ini akan meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja (D_{TK}), karena perusahaan terdorong untuk meningkatkan produksinya. Di sisi lain

para tenaga kerja pun akan menuntut kenaikan upah sebesar kenaikan harga, dalam rangka mempertahankan upah riil. Akibatnya pada saat kurva D_{TK} bergeser ke kanan kurva S_{TK} akan bergeser ke kiri, sehingga keseimbangan baru pada posisi E_1 . Dengan demikian bersamaan dengan kenaikan harga dari P_0 menjadi P_1 upah nominal akan naik dari W_0 ke W_1 dan pada keseimbangan yang baru upah riil tetap, kesempatan kerja dan output riil pun tetap, sehingga kurva AS dalam pandangan Klasik adalah tegak lurus.

Jadi kesimpulannya ahli-ahli Klasik berkeyakinan bahwa ekspansi fiskal hanya meningkatkan suku bunga dan tingkat harga, tetapi tidak menimbulkan perubahan dalam pendapatan nasional riil.

3.1 Kebijakan Fiskal Dalam Pendekatan Keynes

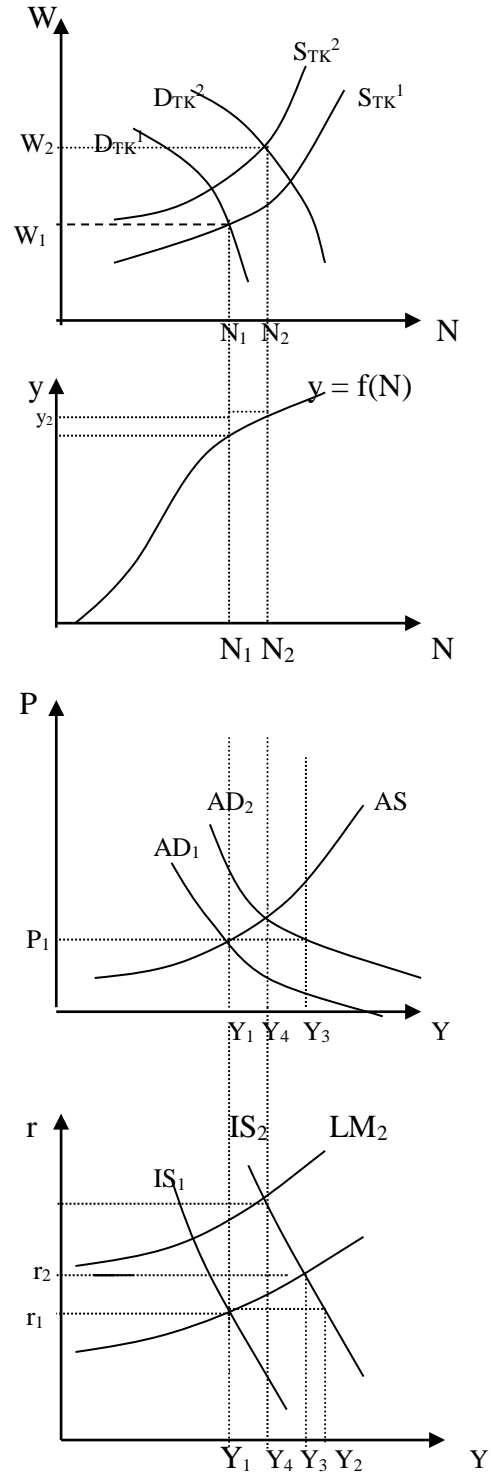
Keyakinan pokok para pemikir makroekonomi Keynesian menyatakan bahwa dalam mengatasi masalah pengangguran kebijakan fiskal lebih efektif daripada kebijakan moneter. Pandangan tersebut adalah implikasi dari:

1. Permintaan uang adalah sensitif terhadap perubahan suku bunga. Perubahan suku bunga akan menimbulkan perubahan yang besar kepada permintaan uang untuk spekulasi, sehingga kurva permintaan uang elastis dan kurva LM akan landai.
2. Investasi tergantung kepada banyak faktor seperti suku bunga, tingkat pengembalian modal yang akan diterima, kemajuan teknologi, ekspektasi. Maka keinginan untuk melakukan investasi adalah inelastis, tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga sehingga kurva IS curam.

Ketika terjadi ekspansi fiskal yang ditunjukkan dengan bergesernya kurva IS (dari IS_1 ke IS_2), output riil naik (dari y_1 ke y_2), sehingga suku bunga naik (dari r_1 ke r_2). Kenaikan r ini akan mengakibatkan investasi turun, sehingga output pun turun (dari y_2 ke y_3). Pada saat harga tetap dengan bergesernya kurva AD (dari AD_1 ke AD_2) sebagai efek dari bergesernya kurva IS, terjadi *excess demand* sehingga tingkat harga naik (dari P_1 ke P_2).

Pengaruh dari kenaikan harga ini di pasar uang adalah sebagai berikut: jika jumlah uang beredar (M^S) tetap maka M^S_{riil} akan turun, sehingga akan

menggeser kurva LM ke kiri. Pengaruhnya suku bunga akan naik (dari r_2 ke r_3), sehingga investasi akan turun dan output pun turun (dari y_3 ke y_4).



Sedangkan pengaruh dari kenaikan harga ini di pasar tenaga kerja adalah sebagai berikut: permintaan TK akan naik karena pengusaha terdorong untuk meningkatkan produksinya. Di sisi lain tenaga kerja pun menuntut kenaikan tingkat upah. Dalam pandangan Keynes terjadi imperfect information ($P^* < 1$), sehingga tuntutan kenaikan upah tidak sebesar kenaikan harga ($\uparrow W < \uparrow P$). Tuntutan kenaikan upah mengakibatkan penawaran TK turun (dari S_{TK}^1 ke S_{TK}^2). Keseimbangan baru pasar TK di (W_2, N_2) dimana upah nominal naik tetapi upah riil turun. Sehingga kesempatan kerja bertambah (dari N_1 ke N_2) dan output naik (dari y_1 ke y_4).

Dengan demikian keseimbangan makroekonomi yang baru di titik (P_2, y_4) , dimana terjadi *growth*, suku bunga naik, pengangguran turun, dan inflasi. Nampak sekali bahwa peran pemerintah naik sementara peran swasta turun. Jadi dalam pandangan Keynes kebijakan fiskal merupakan kebijakan di sisi AD yang efektif merubah keseimbangan makroekonomi.

IV. KEBIJAKAN FISKAL DALAM PEREKONOMIAN TERBUKA (EXTERNAL BALANCE)

Perekonomian terbuka menunjukkan hubungan ekonomi dengan negara lain yang meliputi ekspor-impor barang dan jasa (X-M), serta aliran modal (Net Capital Flow = NCF). Nilai seluruh transaksi ekonomi dengan negara lain tersebut selama kurun waktu tertentu akan nampak dalam neraca pembayaran (Balance of Payment = BOP).

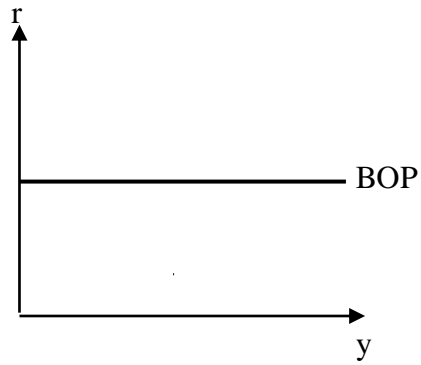
Kurva BOP merupakan kurva yang menunjukkan keadaan keseimbangan BOP pada berbagai tingkat bunga dan output riil. Keseimbangan BOP berarti:

$$(X-M) + NCF = 0$$

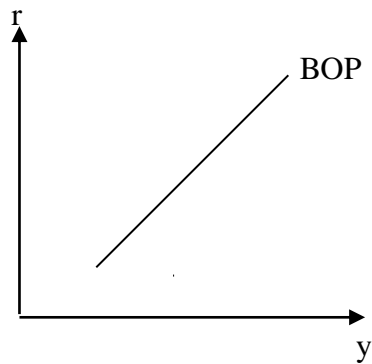
$$X + NCF = M$$

Bagaimana bentuk kurva BOP tergantung dari sifat aliran modal (Chacoliades, 1978: 376):

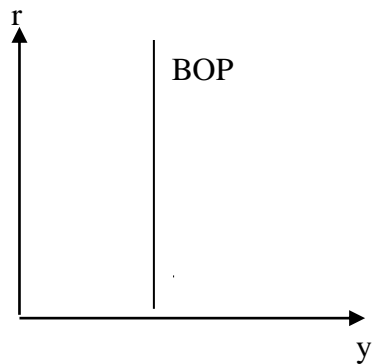
1. Perfect Capital Mobility, jika $K^1 = \infty$ dimana $K^1 = \frac{dK}{dr}$



2. Imperfect Capital Mobility, jika $0 < K^1 < \infty$



3. Perfect Capital immobility, jika $K^1 = 0$



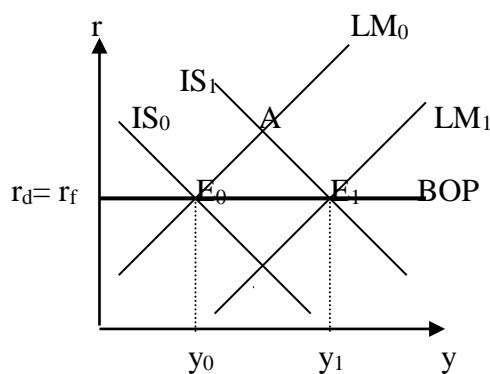
Mengingat dalam transaksi ekonomi dengan negara lain menyangkut mata uang yang berbeda, maka keberadaan kurs akan sangat memegang peranan. Dalam pengelolaan kurs ini ada beberapa pilihan kebijakan yakni sistem kurs tetap,

mengambang bebas, atau yang bersifat gabungan mengambang terkendali. Dan bekerjanya kebijakan fiskal dalam konteks ekonomi makro akan berbeda tergantung sifat aliran modal dan sistem pengelolaan kursnya.

4.1 Kebijakan Fiskal Pada Perekonomian yang Bercirikan Sistem

Kurs Tetap, Perfect Capital Mobility

Ekspansi fiskal akan menggeser kurva IS ke kanan sehingga tercapai keseimbangan baru pada titik A. Pada posisi ini BOP surplus yang berarti penawaran valuta asing lebih besar dari permintaannya, sehingga akan mendorong mata uang terapresiasi. Dalam sistem kurs tetap Bank Sentral mempunyai kewajiban untuk mempertahankan nilai kurs, maka BS harus melakukan pembelian atas kelebihan valas yang akan mengakibatkan bertambahnya M^S . Kenaikan M^S ini akan menggeser kurva LM ke kanan, dan keseimbangan baru di titik E_1 .



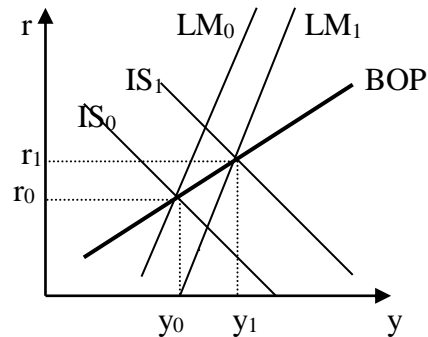
Pada keseimbangan terakhir ini output riil naik secara signifikan. Jadi ekspansi fiskal sangat efektif dalam mendorong kegiatan ekonomi dalam kondisi sistem kurs tetap dan perfect capital mobility.

4.2 Kebijakan Fiskal Pada Perekonomian yang Bercirikan Sistem

Kurs Tetap, Imperfect Capital Mobility

Mekanisme dari ekspansi fiskal dalam kondisi perekonomian yang bercirikan sistem kurs tetap dan imperfect capital mobility, tidak jauh berbeda

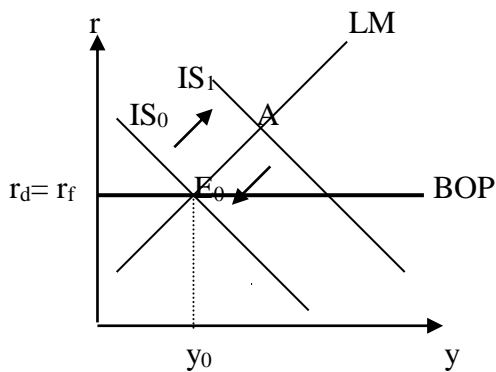
dengan kondisi jika perfect capital mobility. Perbedaannya terletak pada pengaruh terhadap besarnya perubahan kenaikan output.



Perubahan kenaikan output dalam kondisi sistem kurs tetap dan imperfect capital mobility sebagai dampak dari ekspansi fiskal, ternyata lebih kecil jika dibandingkan dengan kondisi sistem kurs tetap dan perfect capital mobility. Hal ini disebabkan karena naiknya suku bunga mengakibatkan turunnya investasi dan output.

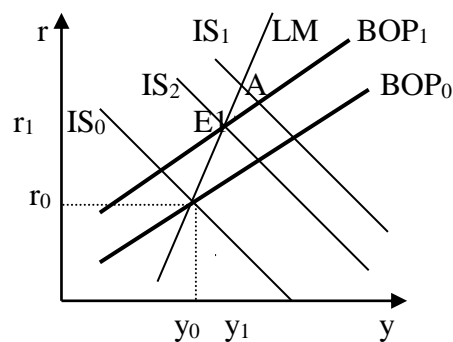
4.3 Kebijakan Fiskal Pada Perekonomian yang Bercirikan Sistem Kurs Fleksibel, Perfect Capital Mobility

Dalam kasus dimana aliran modal sempurna dan sistem kurs fleksibel, kebijakan fiskal tidak efektif sama sekali, karena ketika mata uang domestik terapresiasi mengakibatkan ekspor merosot dan impor meningkat sehingga kurva IS kembali ke posisi awal.



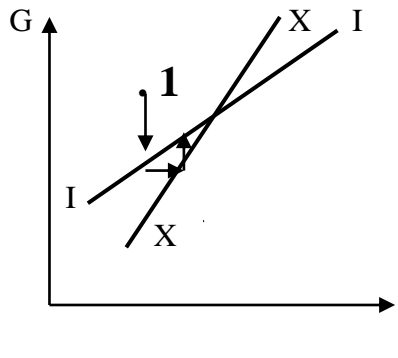
4.4 Kebijakan Fiskal Pada Perekonomian yang Bercirikan Sistem Kurs Fleksibel, Imperfect Capital Mobility

Dalam kasus dimana aliran modal tidak sempurna dan sistem kurs fleksibel, kebijakan fiskal dapat mengembangkan kegiatan ekonomi tetapi ekspansifnya relatif kecil. Ketika mata uang domestik terapresiasi yang mengakibatkan ekspor merosot dan impor meningkat, kurva IS bergeser ke kiri sedikit sehingga masih menunjukkan terjadinya kenaikan output.



V. KEBIJAKAN FISKAL DALAM MEKANISME INTERNAL DAN EXTERNAL BALANCE

Penjabaran dalam bagian tiga dan empat memisahkan analisis mekanisme kebijakan fiskal dalam mencapai keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal. Melalui analisis gabungan *internal dan external balance*, ternyata kebijakan fiskal relatif lebih efektif dalam mencapai keseimbangan internal dibandingkan dengan keseimbangan eksternal. Ini berdasarkan dari pendapat Mundell dalam Chacoliades, bahwa setiap instrument harus dipasangkan dengan targetnya yang mana instrument tersebut memberikan dampak terbesar. Prinsip ini sering disebut EMC (Effective Market Clasification).



Jika perekonomian berada dalam keadaan defisit dan inflasi seperti di titik 1, kombinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk mencapai keseimbangan internal dan eksternal nampak dengan Bergeraknya anak panah. Nampak sekali bahwa berdasarkan prinsip EMC kebijakan fiskal harus diarahkan untuk mencapai keseimbangan internal sementara kebijakan moneter untuk mencapai keseimbangan eksternal, sehingga akhirnya dapat mencapai keduanya.

VI. TEMUAN EMPIRIS: DAMPAK KEBIJAKAN MAKROEKONOMI TERHADAP KINERJA PEREKONOMIAN INDONESIA

Muana Nanga dan Bonar M. Sinaga telah melakukan penelitian tentang Dampak Kebijakan Makroekonomi Terhadap Kinerja Perekonomian Indonesia: Suatu Analisis Pengganda. Berkenaan dengan dampak kebijakan makroekonomi, yang meliputi kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan kebijakan perdagangan luar negeri terhadap kinerja perekonomian Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Pengganda Elastisitas Dinamis Peubah- Peubah Dalam Model

Peubah	Kebijakan Makroekonomi			
	MSR	EXPR	CAD	GEXG
Rasio tabungan domestik	0.00848	1.43213	-0.00786	-0.20588
Pertumbuhan ekonomi	0.00039	0.06623	0.00675	0.19619
Tingkat bunga riil	0.13771	0.00668	-0.16928	-4.44801
Tingkat inflasi	-0.00001	-0.00148	0.03798	0.98409
Pertumbuhan uang beredar	-0.00001	-0.00197	0.04952	0.67640
Defisit anggaran pemerintah	-0.00173	-0.29130	7.33660	23.26063

Keterangan: MSR = rasio jumlah uang beredar
EXPR = rasio ekspor
CAD = defisit transaksi berjalan
GEXG = pertumbuhan pengeluaran pemerintah

Kebijakan fiskal yang dilakukan melalui peubah GEXG = pertumbuhan pengeluaran pemerintah, memiliki dampak yang jauh lebih besar terhadap kinerja perekonomian Indonesia (kecuali terhadap rasio tabungan domestik) dibandingkan dengan kebijakan moneter dan perdagangan internasional selama PJP I. Hal ini tercermin dari angka pengganda elastisitas dinamis kebijakan fiskal yang umumnya cukup tinggi yaitu berkisar antara 0.19619 – 23.26063.

Bertitik tolak dari temuan dalam studi ini, mereka menyarankan bahwa kebijakan fiskal perlu mendapatkan perhatian dan diberi peran yang lebih besar di dalam keseluruhan manajemen makroekonomi Indonesia di masa-masa mendatang (Nanga dan Sinaga, 1999).

VII. PERANAN KEBIJAKAN FISKAL DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) merupakan wadah dimana kebijakan fiskal diformulasikan dan dijabarkan secara legal sebagai kebijakan pemerintah. Sampai tahun anggaran 1999/00 APBN Indonesia disusun atas dasar tiga prinsip, yakni: berimbang, dinamis, dan fungsional dengan format T-Account. Berimbang adalah sisi penerimaan sama dengan sisi pengeluaran. Sedangkan yang dimaksud dengan dinamis adalah diharapkan terjadi peningkatan jumlah S_G (tabungan pemerintah) dari tahun ke tahun, dan semakin kecilnya persentase ketergantungan pembiayaan terhadap bantuan luar negeri (BLN). Fungsional bahwa fungsi BLN hanya untuk membiayai anggaran pembangunan.

Pengeluaran terdiri dari:

- Pengeluaran rutin, yakni: belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom, pembayaran bunga dan cicilan hutang.
- Pengeluaran pembangunan, yakni: bantuan proyek dan bantuan pembangunan berbagai sarana dan prasarana.

Sedangkan penerimaan terdiri dari:

- Penerimaan migas dan non migas : penerimaan pajak dan non pajak.
- Penerimaan pembangunan.

Penerimaan pembangunan di sini tidak lain adalah hutang luar negeri, tapi pemerintah waktu itu menggunakan bahasa halus bantuan luar negeri.

7.1 Kinerja APBN Indonesia Selama Periode 1982/1983 - 1995/1996

Analisis tentang kinerja APBN Indonesia selama periode 1982/1983 - 1995/1996 akan dikaji berdasarkan besarnya rasio penerimaan dan pengeluaran terhadap PDB dan kecenderungan pertumbuhannya berdasarkan perkembangan persentase masing-masing pos penerimaan dan pengeluaran terhadap total anggaran setiap tahunnya. Untuk melihat trend pertumbuhan tersebut digunakan regresi sederhana:

$$G = a + bT \quad \text{dimana:}$$

G = angka rasio penerimaan atau pengeluaran terhadap PDB

T = waktu pengamatan

b = trend pertumbuhan

Melalui analisis sederhana seperti ini dapat diamati fenomena APBN Indonesia selama kurun waktu tersebut. Tabel 2 di bawah ini menunjukkan kinerja APBN dari sisi penerimaan.

Tabel 2
Kecenderungan Pertumbuhan dan Rasio Penerimaan Dalam Negeri Terhadap PDB Periode 1982/83-1995/96

No.	Uraian	Kecenderungan (%)	Rata-rata Rasio (%)
I.	PENERIMAAN DALAM NEGERI		
	a. Penerimaan Migas	0,04	9,19
	b. Penerimaan Non-migas	0,21	11,37
II.	PENERIMAAN PEMBANGUNAN	0,12	5,18

Sumber: Syafrizal Chan, dkk, 1996

Dari ketiga sumber penerimaan, penerimaan non migas memiliki kecenderungan pertumbuhan yang tertinggi, yakni 0,21%. Demikian halnya dari segi rasio penerimaan terhadap PDB, rata-rata kontribusi dari sektor non-migas sebesar 11,37% merupakan sumber penerimaan pemerintah terbesar. Jadi penerimaan dari sektor non migas ini telah memperlihatkan arti pentingnya bagi perekonomian Indonesia. Hal ini sesuai dengan program pemerintah yang pada waktu itu sedang giatnya meningkatkan penerimaan dalam negeri melalui sumber penerimaan non migas, terutama dari sektor perpajakan (GBHN, 1993-1998: 94).

Untuk mengungkapkan peran penerimaan pemerintah dari sektor non migas dalam perekonomian Indonesia dapat dilihat melalui kecenderungan pertumbuhan dan rasionya terhadap PDB seperti terungkap pada tabel 2.

Tabel 3
Kecenderungan Pertumbuhan dan Rasio Penerimaan Sektor Non-migas
Terhadap PDB Periode 1982/83-1995/96

No.	Uraian	Kecenderungan (%)	Rata-rata Rasio (%)
1.	Penerimaan Pajak	0,21	9,85
2.	Penerimaan Bukan Pajak	0,20	1,53

Sumber: Syafrizal Chan, dkk, 1996

Dilihat dari rasio penerimaan pajak sebesar 9,85%, informasi ini mempertegas bahwa sektor penerimaan pajak perannya cenderung menjadi sumber penerimaan pemerintah yang lebih dominan ketimbang sumber penerimaan non-pajak. Namun demikian rasio 9,85% ini masih dibawah nilai ideal. Secara normal besarnya nilai rasio penerimaan pajak terhadap PDB di negara berkembang adalah 14,8% (Musgrave: 1980).

Penerimaan pemerintah dari sektor pajak dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung. Bagaimana peran pajak terhadap perekonomian dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4
Kecenderungan Pertumbuhan dan Rasio Penerimaan dari Sektor Pajak
Terhadap PDB Periode 1982/83-1995/96

No.	Uraian	Kecenderungan (%)	Rata-rata Rasio (%)
1.	PAJAK LANGSUNG	0,21	4,27
	a. Pajak Penghasilan	0,21	3,91
	b. Pajak Bumi dan Bangunan	0,24	0,36
2.	PAJAK TIDAK LANGSUNG	0,21	5,58
	a. Pajak Pertambahan Nilai	0,29	3,24
	b. Bea Masuk	0,17	1,01
	c. Cukai	0,13	1,09
	d. Pajak Ekspor	-0,11	0,08
	e. Pajak Lain-lain	0,11	0,16

Sumber: Syafrizal Chan, dkk, 1996

Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa penerimaan pajak tidak langsung perannya cenderung menjadi sumber penerimaan yang lebih dominan ketimbang penerimaan dari pajak langsung. Fenomena ini merupakan cerminan dari negara-negara sedang berkembang, dimana kecenderungan pertumbuhan dan kontribusi rata-rata penerimaan pemerintah dari pajak tidak langsung lebih besar dari penerimaan pajak langsung (Suparmoko, 1990: 146).

Bila dilihat dari masing-masing jenis penerimaan pajak yang ada, maka secara keseluruhan nampaknya menunjukkan kecenderungan pertumbuhan menaik, kecuali untuk pajak ekspor. Adanya kecenderungan penurunan pajak ekspor diduga karena pemerintah sedang berusaha mendorong eksportir untuk meningkatkan eksportnya.

Selanjutnya dilihat dari rasio masing-masing pajak terhadap PDB, maka pajak penghasilan (PPh) memiliki rata-rata kontribusi yang tertinggi yaitu 3,91%. Kenyataan ini sejalan dengan pendapat Yuyun Wirasmita (1994: 2) yang menyatakan bahwa dengan berkembangnya perekonomian dan terjadinya struktur perekonomian yang diikuti kenaikan pendapatan per kapita, struktur penerimaan perpajakan juga akan mengalami perubahan.

Sementara itu kecenderungan pengeluaran pemerintah dapat dilihat pada dua tabel berturut-turut di bawah ini.

Tabel 5
Kecenderungan Pertumbuhan dan Rasio Rata-rata Pengeluaran Terhadap PDB Periode 1982/83-1995/96

No.	Uraian	Kecenderungan (%)	Rata-rata Rasio (%)
I.	PENGELUARAN RUTIN	0,15	14,16
II.	PENGELUARAN PEMBA- NGUNAN	0,11	11,06

Sumber: Syafrizal Chan, dkk, 1996

Tabel 6
Kecenderungan Pertumbuhan Pengeluaran Rutin dan Rasio Rata-ratanya Terhadap PDB Periode 1982/83-1995/96

No.	Uraian	Kecenderungan (%)	Rata-rata Rasio (%)
1.	Belanja pegawai	0,14	4,31
2.	Belanja barang	0,12	1,39
3.	Subsidi daerah otonom	0,14	2,53
4.	Bunga dan cicilan utang	0,20	5,93

Sumber: Syafrizal Chan, dkk, 1996

Kecenderungan pertumbuhan pengeluaran rutin dan pembangunan cenderung meningkat, namun kenaikan pengeluaran rutin lebih cepat dibandingkan dengan pengeluaran pembangunan. Sedangkan dilihat dari rata-rata rasio pengeluaran terhadap PDB, ternyata selama 14 tahun berturut-turut rata-rata kontribusi pengeluaran rutin terhadap PDB lebih besar daripada pengeluaran pembangunan. Berarti peran swasta dalam kegiatan pembangunan ekonomi semakin nyata.

Sedangkan jika dilihat dari struktur pengeluaran rutin ternyata selama 14 tahun yang lalu rata-rata kontribusi pengeluaran untuk pembayaran bunga dan cicilan hutang terhadap PDB lebih besar daripada pengeluaran rutin lainnya, kecenderungan pertumbuhannya pun relatif tinggi. Informasi ini di satu pihak

memberikan konfirmasi bahwa pemerintah berupaya dengan serius melunasi cicilan hutang dan bunganya.

Namun di sisi lain menimbulkan pertanyaan, karena jumlah hutang dan bunga yang harus dibayar tersebut akan terus meningkat akibat semakin banyaknya yang jatuh tempo, apakah tidak akan mengendorkan momentum pembangunan yang dilaksanakan? Karena semakin besarnya dana mengalir ke luar negeri untuk membayar hutang tersebut akan membatasi berbagai pengeluaran di dalam negeri, dan mendorong permintaan terhadap dollar semakin meningkat.

Berdasarkan fakta di atas berarti prinsip-prinsip yang digunakan dalam menyusun APBN selama kurun waktu tersebut sebatas jargon. Prinsip anggaran berimbang yang ditutup oleh hutang luar negeri (HLN) membuahkan ketergantungan, sehingga semakin besar nilai APBN semakin besar pula penarikan HLN. Akumulasi HLN ini secara perlahan menjadi beban perekonomian dan disinyalir menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi.

7.2 Kinerja APBN Indonesia Pada Masa Krisis Ekonomi dan Pemulihan

Kelangsungan APBN (*fiscal sustainability*) menjadi isu penting disaat krisis ekonomi, karena beban pengeluaran APBN semakin besar. Beban tersebut meliputi alokasi dana APBN untuk:

- pembayaran bunga program rekapitalisasi dan restrukturisasi perbankan
- pembiayaan program JPS
- membengkaknya kebutuhan anggaran untuk subsidi
- pembayaran bunga dan cicilan HLN yang meningkat karena anjloknya nilai rupiah.

Peningkatan kebutuhan pengeluaran untuk menanggulangi krisis tersebut belum tentu dapat diikuti dengan peningkatan di sisi penerimaan. Meningkatkan penerimaan perpajakan di masa krisis bukan merupakan pilihan kebijakan yang mudah diterima masyarakat. Dalam situasi seperti itu APBN senantiasa dibayangi semakin membengkaknya defisit, sehingga mendorong penarikan HLN semakin besar. Pada tahun 1996/1997 HLN baru sebesar Rp 12.414 milyar, dan pada saat

krisis ekonomi yakni tahun 1998/1999 telah mencapai RP 114.585 milyar atau naik hampir 11,4 kali (lihat tabel 7).

Tabel 7
Ringkasan APBN 1996/1997 – 1999/2000 (dalam milyar rupiah)

URAIAN	1996/1997	1997/1998	1998/1999	1999/00
1.Penerimaan dalam negeri	78.203	88.061	149.303	140.804
2.Pengeluaran rutin	56.114	62.159	171.205	134.556
3.Tabungan pemerintah (1-2)	22.089	25.902	-21.902	6.248
4.Pengeluaran pembangunan	34.503	38.928	92.683	83.648
5.Hutang luar negeri (4-3)	12.414	13.026	114.585	77.400

Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN 1999/00

Peran pemerintah melalui kebijakan fiskal dalam melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi perekonomian pada masa krisis sangat dominan. Dalam tiga tahun terakhir pemerintah menjadi motor utama dalam menggerakkan perekonomian agar dapat kembali ke posisi sebelum krisis, karena sektor swasta belum dapat berperan secara optimal.

Secara bertahap langkah-langkah pemulihan dalam perekonomian Indonesia mulai menampakkan hasil pada tahun 1999. Beberapa indikator makroekonomi menunjukkan kinerja yang membaik dibandingkan dengan tahun 1998, seperti:

- tingkat inflasi turun menjadi 20,5% dari 57,5%
- tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai 0,2% dari -13,2%
- laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah menjadi 0,7% dari -15,4%
- laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi swasta menjadi 1,5% dari -3,3%

Secara langsung perbaikan kinerja makroekonomi tersebut berpengaruh terhadap struktur APBN Indonesia. Sesuai dengan semangat reformasi dan tuntutan transparansi, format APBN Indonesia diubah menjadi I-account mengikuti standar GFS (Government Financial Statistic) dan tahun anggaran berubah menjadi tahun kalender, sehingga untuk APBN tahun 2000 mencakup periode dari 1 April – 31 Desember 2000. Adapun kinerja APBN selama 1999/2000 – 2001 tercermin pada tabel di bawah ini.

Tabel 8
Ringkasan Perkembangan Pelaksanaan
Operasional Fiskal Pemerintah, 1999/2000 – 2001
(Dalam Triliun Rupiah)

URAIAN	1999/2000		2000		2001	
	Nilai	% thd PDB	Nilai	% thd PDB	Nilai	% thd PDB
A. Pendapatan Negara	187,8	16,6	205,0	20,7	286,0	19,5
1. Pajak	125,9	11,1	115,8	11,7	185,3	12,6
2. Bukan Pajak	61,9	5,5	89,2	9,0	100,7	6,9
B. Belanja Negara	231,9	20,4	221,0	22,4	340,3	23,2
1. Belanja rutin	156,8	13,8	161,4	16,3	213,4	14,5
2. Belanja Pembangunan	45,2	4,0	25,7	2,6	45,4	3,1
3. Dana Perimbangan	29,9	2,6	33,9	3,4	81,5	5,6
C. Defisit Anggaran (A-B)	(44,1)	(3,9)	(15,0)	(1,5)	(54,3)	(3,7)
D. Pembiayaan Anggaran	44,1	3,9	15,0	1,5	54,3	3,7
1. Dalam negeri	14,7	1,3	5,4	0,6	34,4	2,3
2. Luar Negeri, netto	29,4	2,6	9,6	1,0	19,9	1,4

Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN 2002

Krisis ekonomi berdampak pada penyusutan basis penerimaan pajak secara umum, namun upaya intensifikasi dan ekstensifikasi serta penyempurnaan peraturan, perpajakan mampu meningkatkan pendapatan negara. Sedangkan dalam PNBPN penerimaan SDA dan migas menjadi penyumbang terbesar.

Di sisi lain krisis ekonomi dan pelaksanaan desentralisasi fiskal menyebabkan beban belanja negara meningkat tajam. Faktor utama penyebab bertambah besarnya beban anggaran belanja dalam kurun waktu tersebut adalah naiknya pengeluaran rutin akibat krisis ekonomi dan adanya kebutuhan untuk memberikan stimulus secara terbatas pada perekonomian nasional sesuai dengan kemampuan fiskal. Sebagian besar dari jenis pengeluaran rutin ini merupakan pengeluaran yang bersifat *non-discretionary*, seperti pembayaran bunga utang yang meningkat dua kali lipat, subsidi BBM karena harga minyak mentah yang tinggi dan akibat depresiasi rupiah, dan belanja pegawai.

Defisit APBN diupayakan menurun secara bertahap sejalan dengan upaya penyehatan APBN guna mencapai *fiscal sustainability*. Pembiayaan defisit diutamakan menggunakan sumber pembiayaan dalam negeri yang berasal dari privatisasi BUMN, penjualan asset program restrukturisasi perbankan, dan penjualan obligasi pemerintah. Sedangkan pembiayaan luar negeri bersih terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

Dalam tahun 2002 kebijakan keuangan negara diarahkan pada upaya untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*), pemberian stimulus fiskal, dan menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. *Fiscal sustainability* diupayakan melalui:

- penurunan rasio defisit anggaran terhadap PDB
- rasio stok hutang pemerintah terhadap PDB menjadi 72% pada akhir 2002

Secara rinci RAPBN 2002 dapat dilihat pada tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9
Ringkasan RAPBN Tahun 2002
(Dalam Triliun Rupiah)

URAIAN	2001		2002	
	Nilai	% thd PDB	Nilai	% thd PDB
A. Pendapatan Negara	286,0	19,5	289,4	17,1
1. Pajak	185,3	12,6	216,8	12,8
2. Bukan Pajak	100,7	6,9	72,6	4,3
B. Belanja Negara	340,3	23,2	332,4	19,6
1. Belanja rutin	213,4	14,5	195,0	11,5
2. Belanja Pembangunan	45,4	3,1	47,1	2,8
3. Dana Perimbangan	81,5	5,6	90,3	5,3
C. Defisit Anggaran (A-B)	(54,3)	(3,7)	(43,0)	(2,5)
D. Pembiayaan Anggaran	54,3	3,7	(43,0)	(2,5)
1. Dalam negeri	34,4	2,3	25,4	1,5
2. Luar Negeri, netto	19,9	1,4	17,6	1,0

Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN 2002

Penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp 216,8 triliun (12,8% terhadap PDB) sejalan dengan membaiknya berbagai variabel yang menentukan penerimaan perpajakan, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kurs rupiah terhadap AS \$ dan kebijakan yang akan ditempuh dalam bidang perpajakan. Sedangkan PNB yang direncanakan masih tetap didominasi oleh SDA dan migas.

Anggaran belanja pemerintah tahun 2002 turun sekitar 3,3% dibanding tahun 2001, dimana penurunan ini seluruhnya bersumber dari penurunan pengeluaran rutin. Sementara volume pengeluaran pembangunan justru dianggarkan mengalami peningkatan.

Turunnya pengeluaran rutin sebesar 8,6% akibat berkurangnya beban subsidi BBM sekitar 30,3% dan bunga utang. Upaya penurunan beban subsidi BBM dilakukan melalui kenaikan harga BBM rata-rata tertimbang 30% mulai bulan Januari 2002, peningkatan efisiensi Pertamina, serta pemberantasan penyelundupan. Kenaikan harga BBM merupakan pilihan kebijakan yang sangat tidak populer, namun akan memperluas ruang gerak program-program lain.

Sedangkan upaya untuk mengurangi beban bunga utang dalam negeri akan dilakukan melalui *asset-bond-swap*, yakni pertukaran antara asset-asset yang telah direstrukturisasi dengan obligasi yang dimiliki bank-bank. Sementara upaya untuk mengurangi beban bunga utang luar negeri akan ditempuh antara lain dengan: mengurangi jumlah pinjaman luar negeri baru secara bertahap, mengupayakan pinjaman baru dengan persyaratan yang seringan mungkin, mempercepat penarikan komitmen pinjaman yang sudah ada, serta melakukan pembatalan proyek-proyek pinjaman luar negeri yang dinilai tidak efisien dan efektif.

Pengeluaran pembangunan tahun anggaran 2002 dianggarkan sekitar 2,8% dari PDB yang secara nominal naik lebih dari 3%. Prioritas alokasi belanja pembangunan akan diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM, serta penyediaan pelayanan kebutuhan dasar.

Defisit APBN 2002 diperkirakan mencapai 2,5% terhadap PDB, dan akan menghadapi tantangan yang makin berat dalam pembiayaannya. Pembiayaan luar negeri bersih diperkirakan akan negatif yang berarti total penarikan pinjaman luar

negeri tidak cukup untuk menutupi kebutuhan pembiayaan untuk pembayaran cicilan pokok utang luar negeri. Pembiayaan luar negeri bersih yang negatif ini akan mengurangi kemampuan pembiayaan luar negeri untuk menutup defisit anggaran, maka konsekuensinya pemerintah harus mengambil langkah mencari pinjaman baru (melalui forum CGI) dan melakukan *rescheduling* terhadap utang yang jatuh tempo (melalui forum Paris club III).

Keberhasilan penjadwalan utang senilai US \$ 5,4 milyar melalui forum Paris club III yang ditandatangani pada tanggal 12 April 2002, menurut Syahrir merupakan solusi yang bersifat *ad hoc*, memecahkan persoalan sekeping demi sekeping. Seharusnya ada suatu konstruksi utang yang benar-benar bersifat menyeluruh, efektif, dan mampu membuat anggaran kembali menjadi instrument bagi ekspansi ekonomi (Kompas, 15 April 2002).

Di sisi lain upaya untuk membiayai defisit anggaran yakni mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri yaitu dari privatisasi dan penjualan asset program restrukturisasi perbankan. Pada tahun anggaran 2002 ini BPPN diharapkan dapat merestrukturisasi aset perbankan yang akan ditukar dengan obligasi rekap melalui *asset bond swap*. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi utang pemerintah yang pada gilirannya akan mengurangi beban utang dalam negeri.

7.3 Keterkaitan Antara APBN Dengan Neraca Pembayaran

Keseimbangan neraca pembayaran merupakan salah satu target kinerja makroekonomi. Sekalipun neraca pembayaran menggambarkan intensitas transaksi ekonomi dengan pihak luar negeri, performansi neraca pembayaran secara utuh tidak lepas dari operasionalisasi fiskal yang ditempuh pemerintah. Maksudnya ada keterkaitan antara kondisi APBN sebagai wadah operasionalisasi fiskal yang dipilih oleh pemerintah dengan kinerja neraca pembayaran.

Sebagai catatan ringkas yang mencatat seluruh transaksi ekonomi antar penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama kurun waktu tertentu, anatomi neraca pembayaran (Balance of Payment = BOP) mencakup

neraca berjalan (*current account*) dan neraca modal (*capital transaction*). Adapun format standar IMF sebuah BOP adalah sebagai berikut:

- A. CURRENT ACCOUNT
 - I. MERCHANDISE
 - II. SERVICES
- B. CAPITAL TRANSACTION
 - I. OFFICIAL CAPITAL
 - II. PRIVATE CAPITAL
- C. TOTAL
- D. ERROR AND EMISSIONS
- E. OFFICIAL RESERVES

Ada hubungan timbal balik antara neraca berjalan dengan neraca modal. Jika suatu negara mengalami defisit dalam neraca berjalannya, akan mendorong negara tersebut melakukan penarikan modal dari luar negeri (*capital inflow*) untuk menutup defisitnya. Kemudian pembayaran bunga dan deviden dari *capital inflow* pada gilirannya akan membebani pos neraca jasa. Dari sifat hubungan seperti ini, kajian tentang keterkaitan antara APBN dengan neraca pembayaran dalam makalah ini akan diungkapkan melalui kinerja neraca berjalannya.

Sebuah rekayasa persamaan identitas output dalam Batiz (1994 p. 266-268), Krugmann (1995, p.18-22) bahwa:

$$\begin{aligned}
 Y &= C + I + G + (X-M) \\
 (X-M) &= Y - C - I - G \\
 Y - C - G &= S \\
 (X-M) &= CA \text{ (CURRENT ACCOUNT)}
 \end{aligned}$$

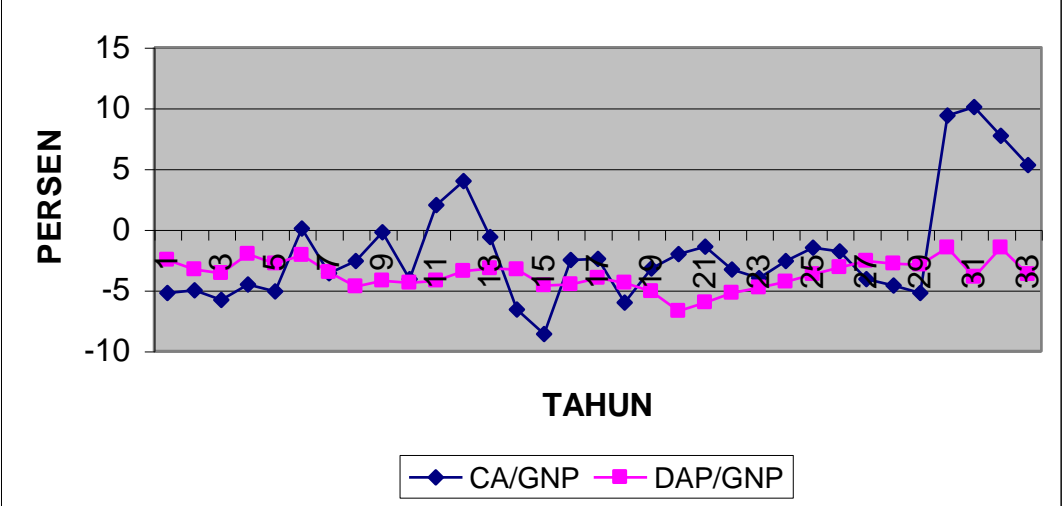
$$\begin{aligned}
 CA &= S - I \\
 S &= S^P + S^G \\
 S^G &= T - G \\
 CA &= S^P + (T - G) - I \\
 CA &= (S^P - I) + (T - G)
 \end{aligned}$$

Keseimbangan transaksi berjalan secara langsung berhubungan dengan ekspor impor barang dan jasa, namun secara utuh berhubungan dengan:

- Permintaan agregat yang tidak lagi hanya sebatas permintaan terhadap produk dalam negeri melainkan juga atas produk luar negeri
- Kegiatan pengembangan investasi swasta domestik yang didukung oleh tabungan swasta (*saving- investment gap*)
- Kemampuan pemerintah dalam menjalankan APBN (*government budget gap*).

Dalam melakukan analisis hubungan antara *current account*, *saving- investment gap*, dan *government budget gap*, semua data dirasionalkan terhadap GNP. Jadi berdasarkan persamaan dari rekayasa identitas di atas, bahwa kondisi surplus atau defisit neraca berjalan bersumber dari *government budget gap* dan *saving- investment gap*.

Bagaimana hubungan antara *current account*, *saving- investment gap*, dan *government budget gap* selama PJP I dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



VIII. PENUTUP

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrument kebijakan pemerintah dari sisi permintaan berkaitan dengan besaran anggaran (struktur pajak, belanja pemerintah, dan subsidi), yang dapat dipakai untuk mencapai target output, angka pengangguran, dan inflasi pada level tertentu.

Kebijakan fiskal secara utuh berada dalam jalur pemikiran Keynes, bahwa dengan adanya ekspansi fiskal dapat mendorong terjadinya *growth*, suku bunga naik, pengangguran turun, dan inflasi. Jadi kebijakan fiskal sangat efektif merubah keseimbangan makroekonomi. Dan untuk kasus Indonesia kebijakan fiskal (melalui peubah GEXG=pertumbuhan pengeluaran), memiliki dampak yang jauh lebih besar terhadap kinerja perekonomian Indonesia dibandingkan dengan kebijakan moneter dan perdagangan internasional.

APBN Indonesia sebagai wadah operasional kebijakan fiskal selama periode menjelang krisis yang menganut prinsip berimbang, berujung pada tingginya ketergantungan terhadap utang luar negeri. Beban utang luar negeri ini disinyalir merupakan salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi. Dan selama periode krisis dan pemulihan, APBN Indonesia selalu dihadapkan pada kondisi defisit dimana dalam pembiayaannya kembali melibatkan utang-utang baru dan privatisasi BUMN, serta mengoptimalkan peranan BPPN sebagai agent pemulihan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Branson William. H., 1989, *Macroeconomic Theory and Policy*, Third Edition, Harper and Row Publishers, Singapore
- Chacoliades Miltiades, 1978, *International Monetary Theory and Policy*, Second Edition, Mc Graw Hill Book Company
- Glahe Fred. R, 1977, *Macroeconomic Theory and Policy*, Second Edition, Harcourt Brace Jovanovich, Inc
- _____, *Nota Keuangan dan RAPBN RI 2002*
- Romer David, 1996, *Advanced Macroeconomics*, The Mc Graw Hill Book Company
- Sadono Sukirno, 2000, *Makroekonomi Modern*, PT Raja Grafindo Persada
- Sjahrir, 2002, *Paris Club III: Rutinitas Sukses yang Berbahaya*, Kompas 15 April 2002
- Soediyono, 1992, *Ekonomi Makro: Analisa IS-LM*, Liberty Yogyakarta
- Sritua Arief, 1996, *Teori Ekonomi Makro Lanjutan*, PT Raja Grafindo Persada
- Subarna Tirtakusumah, dkk., 2000, *Kebijakan Operasional APBN dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Indonesia*, Makalah Dalam Seminar Kebijakan Operasional Pemulihan Ekonomi, Bandung 20 Novemeber 2000
- Syafrizal Chan, dkk., 1996, *Analisis Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kurun Waktu 1982/1983 – 1995/1996*, Makalah Dalam Seminar Tinjauan Teoritis Atas Kinerja dan Prospek Ekonomi Indonesia Dalam Memasuki Era Persaingan Bebas, Bandung 2 November 1996
- Tim Asistensi Menteri Keuangan Departemen Keuangan, 2001, *Mempertahankan Kelangsungan Anggaran Negara*, Mei 2001